

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERBASIS *SUSTAINABLE LIVELIHOODS* DI KABUPATEN BARRU

Dian Putri Maharani^{1*}, Abdul Mahsyar², Muhammad Randhy Akbar³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of the sustainable livelihood approach in maintaining the sustainability of MSMEs in Barru Regency. This research uses a descriptive qualitative research type. Data collection techniques through interviews, documents and direct observation. The data analysis technique uses "content analysis" through data reduction, data presentation and drawing conclusions. While the validation of the data using triangulation in-depth interview techniques, observation, and document review. The results of this study found that the application of a sustainable livelihoods approach to minimize risks that occur local governments have work programs run by the Cooperatives, SMEs and Trade Offices, especially in the MSME work program, namely by conducting MSME Organizational Development, Conducting Training, and Facilitating Financing Sources.

Keywords: *development, sustainable livelihood, umkm*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pendekatan *ustainable livelihood* dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan obsevasi langsung. Teknik analisis data menggunakan "content analys" melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi tehnik wawancara mendalam, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk meminimalisasi risiko yang terjadi pemerintah daerah mempunyai program kerja yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terkhusus pada program kerja UMKM yaitu dengan cara melakukan Pembinaan Organisasi UMKM, Melakukan Pelatihan, Memfasilitasi Sumber Pembiayaan.

Kata kunci: pengembangan, mata pencaharian berkelanjutan, umkm

* dianputrimaharani@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang kuat. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Nurhikmah et al., 2014). Khususnya di Indonesia, hal itu ditunjukkan pada periode 1998-2000 pada masa darurat terkait uang sekitar maka UMKM memiliki pilihan untuk bertahan dan secara mengejutkan menjadi pemulih keuangan. Kemudian, pada saat itu, pada masa prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian dan dunia usaha di Indonesia juga mengalami konsekuensi yang merugikan karena keadaan darurat yang mendunia, namun oleh sektor UMKM memiliki pilihan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Lebih terampil dalam mendukung perekonomian sehingga perkembangan moneter negara masih dapat diterima dalam menghadapi darurat dunia.

Kehadiran UMKM sendiri merupakan salah satu upaya elektif untuk mengatasi kemelaratan melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki fleksibilitas yang cukup solid dalam menghadapi keadaan darurat moneter yang dihadapi negara Indonesia. Meskipun kita umumnya

menyadari bahwa UMKM kurang mendapat perhatian di Indonesia sebelum terjadi bencana pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis keuangan melanda Indonesia (yang telah melumpuhkan banyak organisasi besar) sebagian besar UMKM telah bertahan, meskipun Fakta bahwa jumlah mereka berkembang pesat, pertimbangan tentang UMKM telah berubah menjadi isu utama. UMKM yang lebih besar dan lebih membumi juga didukung oleh desain permodalan mereka yang lebih mengandalkan modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% penyedia (Niode, 2009).

Ada ketakutan pemerintah tentang pertumbuhan yang rendah sehingga mereka kembali dengan kebijakan ekonomi konglomerasi mengingat tekanan dari dunia internasional agar Indonesia mengejar pertumbuhan daripada pemerataan. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP UMKM), mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM).

Bertahan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, UMKM di Kabupaten Barru harus bisa masuk ke dalam dunia digital. Tetapi, masih ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi. Untungnya Pemerintah daerah Barru terus membuka wawasan ini dan telah melakukan beberapa kali Bimtek bersama Kemkominfo melalui Balai Besar Pengembangan SDM Kominfo Makassar dan Diskominsta Barru. Pemerintah daerah berharap adanya pelatihan *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA) bagi pelaku UMKM dan ibu-ibu rumah tangga ini dapat bangkit kembali dimasa era new normal atau masa Pandemi Covid-19. Selain itu, mempersiapkan melalui aplikasi ini tentunya sangat memudahkan para pelaku UMKM untuk kemudian mengembangkan usahanya. Faktor-faktor, misalnya, tidak adanya kemampuan menyesuaikan diri dengan komputerasi hingga keraguan UMKM untuk mengubah gaya pertukaran mereka menjadi kesulitan besar.

Menurut para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Barru sangat berdampak pada usahanya. Akhirnya pendapatan-pendapatan para UMKM di Kabupaten Barru mulai menurun, saat ini UMKM yang ada di Kabupaten Barru memiliki keterbatasan modal,

banyak pelaku usaha memulai bisnisnya dari kecil lagi yang dulunya mempunyai pendapatan yang besar, sekarang tidak lagi akibat covid-19 ini. Pengelolaan seadanya dan keahlian terbatas membuat laju pertumbuhan UMKM biasa tidak terlalu cepat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Barru, Andi Takdir mengatakan bahwa ada sekitar 7000 pelaku UMKM yang telah diusulkan untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian Koperasi. Bantuan tersebut akan disalurkan ke pelaku usaha melalui nomor rekening yang bersangkutan dengan cara melengkapi data usulan yang memenuhi sejumlah persyaratan. (Cahyadi, 2020).

Konsep *livelihood* atau penghidupan mulai dikembangkan oleh *Department for International Development* (DFID) pada tahun 1990-an dengan kerangka konseptual untuk membantu merumuskan berbagai program aksi pelaksanaan kerja pemberantasan kemiskinan maupun keterbelakangan yang sering terjadi pada negara berkembang (Knutsson, 2006). Hal ini dapat dioptimalkan melalui pendekatan *Sustainable Livelihoods* yaitu kelebihan dan kekurangan *sustainable Livelihood*, pemetaan kerentanan, pentagon aset, transformasi proses dan struktur,

strategi penghidupan, dan output yang dihasilkan.

Menurut Budi (2014), pada Bab 1 Pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menjelaskan UMKM yaitu: Usaha Mikro merupakan usaha profitable milik perorangan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan bukan pekerja atau bukan bagian dari suatu organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau berubah menjadi suatu bagian baik secara langsung maupun sebagai implikasi dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi standar sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi *profitable* yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan bukan pekerja atau bukan bagian dari suatu organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau berubah menjadi suatu bagian baik secara langsung maupun sebagai implikasi dari Usaha Menengah atau

Besar yang memenuhi standar sebagai berikut : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi *profitable* yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan bukan pekerja atau bukan bagian dari suatu organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau berubah menjadi suatu bagian baik secara langsung maupun sebagai implikasi dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi standar sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan lebih banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Nayla (2014), kriteria UMKM terdiri dari sebagai berikut: 1) Manajemen Bisnis Sendiri. 2) Modal Usaha Terbatas, UMKM memiliki modal yang terbatas. 3) Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal. 4) Bersifat Usaha Keluarga. 5) Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik 6) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga. Menurut Rahmawan (2015), peran ekonomi meliputi: 1) Struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya bertumpu pada keberadaan UMKM akan tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan, baik dari segi nilai maupun keuntungan yang diraih. Dengan mendorong kelas bisnis, itu akan membuat sebagian besar bantuan dari pemerintah. 2) Sektor UMKM selama ini telah berorientasi ekspor sehingga membantu pemerintah dalam mendapat devisa. 3) Sektor UMKM lebih mudah beradaptasi dalam berbagai kondisi keuangan yang sulit karena sekarang memiliki pengetahuan tentang Indonesia. 4) Lebih banyak penggunaan bahan mentah buatan dalam negeri sehingga tidak mengganggu nilai impor seperti yang telah dilatih oleh organisasi besar.

Menurut Saragih et al (2007), *Sustainable Livelihood Approach* (Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan) merupakan perspektif

dan bekerja untuk perbaikan yang tumbuh secara berkembang dan sepenuhnya dengan niat mengedepankan semua upaya untuk mengakhiri kemiskinan dengan lebih layak. *Livelihood* akan berkelanjutan jika pekerjaan yang ada memberdayakan individu untuk menghadapi dan memulihkan diri dari tekanan, memberdayakan individu untuk mengawasi dan membentengi kemampuan tanggung jawabaliran mereka dan kemakmuran masa depan, dan tidak mengurangi sifat aset reguler yang ada. Sumber daya dibahas dalam lima dimensi yang biasanya disebut dengan *Pentagonal Asset* yang berbentuk segilima yang mendeskripsikan bahwa antar komponen aset atau sumber daya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan bersifat saling melengkapi. Semakin mendekati titik tengah, artinya aset yang dimiliki rumah tangga tidak maksimal. Idealnya semakin mendekati titik luar dari segilima (pentagon) dipandang lebih baik untuk menghadapi risiko dan kerentanan.

Di bawah ini merupakan pentagon aset yang terkandung dalam *sustainable livelihood*. 1) Modal Manusia (*Human Capital*). 2) Modal Alam (*Nature Capital*). 3) Modal Fisik (*Physical*

Capital). 4) Modal Keuangan (*Financial Capital*). 5) Modal Sosial (*Social Capital*).

Secara mendetail, sustainable livelihood memiliki beberapa konsep inti, yakni sebagai berikut: 1) *People-centred*. Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan merupakan perspektif dan bekerja untuk perbaikan yang tumbuh secara perkembangan dan bertekad untuk mengedepankan semua upaya untuk mengakhiri kebutuhan dengan lebih menarik. Panggilan akan masuk akal jika mata pencaharian yang ada memberdayakan individu untuk menghadapi dan memulihkan diri dari tekanan dan guncangan, memberdayakan individu untuk mengawasi dan memperkuat kapasitas dan tanggung jawab untuk arus dan kemakmuran masa depan mereka, dan tidak mengurangi sifat aset normal yang ada. 2) *Holistik*. Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan terlihat mengenali rintangan terbaik yang dilihat, dan peluang paling menggembirakan dan terbuka untuk jaringan, tidak terlalu memikirkan dari mana mereka berasal (misalnya di daerah mana, di distrik mana atau di tingkat apa, dari terdekat ke global). Metodologi ini memperluas kesepakatan atau arti dari hambatan dan bukaan ini di daerah setempat dan jika

memungkinkan, metodologi ini dapat membantu jaringan untuk mendiskusikan/mengetahui tentang batas dan bukaan ini. 3) *Dinamis*. Serupa dengan mata pencaharian individu dan faktor institusional dan primer yang membentuk atau mengkondisikan mereka sangat kuat, demikian pula metodologi ini. Metodologi ini terlihat untuk memahami dan mengambil keuntungan dari perubahan sehingga dapat mendukung contoh positif kemajuan dan membantu membuang contoh negatif. 4) *Membangun Kekuatan dan Kapasitas Lokal*. Standar penting dari metodologi ini adalah memulai dengan penyelidikan kualitas dan batasan terdekat, daripada kebutuhan yang harus disediakan dari luar. Ini tidak berarti bahwa metodologi ini menempatkan sorotan yang tidak perlu pada warga negara yang baik. Semua hal dipertimbangkan, metodologi ini menyarankan untuk memahami kemampuan intrinsik, semuanya sama, terlepas dari apakah yang diharapkan berasal dari organisasi interpersonal mereka yang solid, penerimaan mereka ke aset dan kerangka kerja yang sebenarnya, kapasitas mereka untuk memengaruhi fondasi utama atau variabel lain yang mungkin dapat mengurangi kemiskinan 5) *Hubungan*

Makro-Mikro. Latihan peningkatan akan lebih sering berpusat di sekitar skala penuh atau tingkat miniatur. Pendekatan mata pencaharian yang dapat dikelola terlihat untuk mengatasi masalah ini, menggarisbawahi pentingnya strategi dan fondasi tingkat skala besar untuk keputusan keberadaan dan pekerjaan jaringan dan orang-orang. Metode ini juga menekankan persyaratan untuk kemajuan dan pengaturan level yang tidak dapat disangkal yang mengacu pada ilustrasi dan pemahaman yang diperoleh di level terdekat. Sementara ini akan memberikan jaringan lingkungan pekerjaan dalam membuat strategi dan meningkatkan kecukupan secara umum.

6) Keberlanjutan. Terlepas dari kenyataan bahwa kita secara teratur mendengar dan menggunakan ungkapan "pendekatan mata pencaharian", dukungan sangat penting untuk metodologi ini. Pikiran ini tidak boleh diabaikan atau dihalangi. Bagaimanapun baiknya suatu pendampingan jika tidak ada aspek keberlanjutannya akan mandek begitu saja dan tidak bisa berkembang terus-menerus.

Menurut (Nafiah, 2019), pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan dapat memberikan pandangan secara

menyeluruh mengenai problematika yang dihadapi dan mendesak yang dirasakan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, gerakan pemberdayaan dapat diarahkan pada kegiatan individu dan rumah tangga agar mampu mendapatkan dan menggunakan aset social dan ekonomi. Gerakan tersebut yaitu dengan cara mencari peluang tambahan, mengurangi bahaya, mengurangi kelemahan, dan mengikuti atau meningkatkan panggilan mereka. Dapat terdeteksi potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk dijadikan media dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan *skill* agar tercipta kemandirian ekonomi di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan alasan adalah pemilihan data pada penelitian ini didasarkan pada data yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2006: 4), "Teknik subyektif sebagai metode pemeriksaan yang menghasilkan informasi ekspresif

sebagai kata-kata yang disusun atau diungkapkan secara verbal dari individu dan perilaku yang dapat dideteksi”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Wawancara, 2) Dokumen, 3) Observasi Langsung.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yakni informasi yang didapat dari rapat atas ke bawah dilakukan secara fisik sesuai petunjuk informasi subjektif dan sesuai tujuan konsentrasi ini dan kemudian diperiksa dengan menggunakan strategi "*content analysis*" sebagai berikut, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Sajian Data, 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor perekonomian informal seperti usaha Kedai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut dalam jangka panjang. Keberadaan usaha Kedai dapat memberikan motivasi guna meningkatkan mental kewirausahaan dan mewujudkan kemandirian ekonomi pada masyarakat. Dengan demikian, penggunaan serta penerapan Sustainable Livelihood diperlukan untuk mengetahui keberlangsungan pengembangan UMKM agar pengusaha dapat memberdayakan aset yang dimiliki, meminimalisasi kerentanan,

hingga menentukan strategi penghidupan berdasarkan transformasi proses oleh pemerintah setempat untuk memperoleh hasil yang yang diharapkan.

Membina Organisasi UMKM

Pembinaan merupakan usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu. Dimana pemerintah daerah memiliki sasaran untuk meningkatkan jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam mensejahterahkan dirinya dalam perekonomian nasional.

Beberapa keterangan dari informan yaitu Bapak Kepala Dina Koperasi, UKM dan Perdagangan, Bapak Kepala Bidang UMKM dan Transmigrasi serta beberapa pemilik kedai menjelaskan bahwa memang betul adanya pembinaan langsung yang diberikan kepada pemilik usaha kedai dari pemerintah daerah, pembinaan tersebut pun tak lepas dari evaluasi pemerintah daerah agar nantinya pembinaan tersebut bisa tetap berjalan dengan baik.

Melakukan Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja manusia. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan dari pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kreativitas dan juga kemandirian dari setiap peserta pelatihan yang memberikan manfaat untuk mengembangkan kemampuan diri.

Beberapa keterangan dari Bapak Kepala Dina Koperasi, UKM dan Perdagangan, Bapak Kepala Bidang UMKM dan Transmigrasi serta beberapa pemilik kedai dan konsumen menjelaskan bahwa program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tidak dapat direalisasikan kepada pemilik usaha kedai dikarenakan pelaku usaha kedai itu sendiri bisa membuat atau membeli resep tanpa ada pelatihan dengan kata lain pemilik kedai mampu memanajemen sumber daya alam serta sumber daya fisik yang ada walaupun tidak sepenuhnya. Namun, pelaku usaha kedai tetap memerlukan pendampingan

dari pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk pemasaran produk.

Memfasilitasi Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah cara yang digunakan perusahaan untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tertentu. Pentingnya sumber pembiayaan yaitu dapat membandingkan sumber pembiayaan dengan “bahan bakar”, yang membuat bisnis berjalan dengan sukses. Inilah yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tujuannya dan mencapai tujuannya.

Dapat diketahui dari wawancara Bapak Kepala Dina Koperasi, UKM dan Perdagangan, Bapak Kepala Bidang UMKM dan Transmigrasi serta beberapa pemilik kedai bahwa sumber pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa modal pinjaman dari bank (KUR) dan ada beberapa bahkan sebagian besar pemilik usaha yang ada di Kabupaten Barru untuk tetap meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM dari segi perekonomian.

KESIMPULAN

Pendekatan *sustainable livelihood* bersifat kaku, namun dapat diterapkan fleksibel tergantung pada konteks

Negara/daerah. Karenanya, pendekatan ini dapat diterapkan di manapun dalam situasi dimana mata pencaharian perlu dipahami dan ditingkatkan sehingga membuatnya lebih berkelanjutan. Begitu pula dengan penerapan pendekatan penghidupan berkelanjutan dalam mempertahankan keberlanjutan UMKM pada program Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Pada program kerja yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terkhusus pada program kerja UMKM yaitu 1) Pembinaan Organisasi UMKM, memang betul adanya pembinaan langsung yang diberikan kepada pemilik usaha kedai dari pemerintah daerah, pembinaan tersebut pun tak lepas dari evaluasi pemerintah daerah agar nantinya pembinaan tersebut bisa tetap berjalan dengan baik. 2) Melakukan Pelatihan, program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tidak dapat direalisasikan kepada pemilik usaha kedai dikarenakan pelaku usaha kedai itu sendiri bisa membuat atau membeli resep tanpa ada pelatihan dengan kata lain pemilik kedai mampu memanajemen sumber daya alam serta sumber daya fisik yang ada walaupun tidak sepenuhnya. Namun, pelaku usaha kedai tetap memerlukan pendampingan

dari pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk pemasaran produk. 3) Memfasilitasi Sumber Pembiayaan, sumber pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa modal pinjaman dari bank (KUR) dan ada beberapa bahkan sebagian besar pemilik usaha yang ada di Kabupaten Barru untuk tetap meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM dari segi perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyawan, A. A. (2016). *Pengaruh Teamwork, Kepuasan Kerja, dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan PT Tjiwi Kimia, Tbk* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Aminuddin, A. (2017). Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. *Jurnal Ekonomi, Vol. 13, N, 79*.
- Budi, H. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses dan Kelas Dunia Melalui UMKM*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Cahyadi, A. (2020). *Ribuan Pelaku UMKM di Barru Diusulkan Terima Bantuan*. Pare Pos.co.id.
- Endang, P. (2012). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. *Jurnal Among Makarti, 5(9), 18*.
- Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XV, N, 19*.

- Knutsson, P. (2006). The Sustainable Livelihoods Approach: A Framework for Knowledge Integration Assessment. *Human Ecology Review*, 13(90).
- Nafiah, I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dusun Ngelorejo Melalui Pengolahan Limbah Konveksi Menjadi Kerajinan Keset Berbasis Sustainability Livelihood. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2).
- Nayla, A. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).
- Nurhikmah, Prastika, E., & Djauhar, E. P. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. *Jurnal LITBANG Kota Pekalongan Tahun 2014*.
- Olivier, S. (2015). *The Sustainable Livelihoods Approach*. Knowledge Solutions.
- Osborne, D., & Ted, G. (2005). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government): Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik* (Cet 8). Jakarta: PPM Manajemen.
- Pavilawati, D. A. (2020). *Analisis Keberlangsungan Usaha Pembuatan Taoge Ditinjau Dari Sustainable Livelihood Framework (Studi Kasus di Desa Penambangan, Kecamatan BalongBendo, kabupaten Sidoarjo)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Rahmawan, B. (2015). *Pembangunan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rathna, W., Baiquni, M., & Rika, H. (2016). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pudur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4(140).
- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). *Kerangka Penghidupan yang Berkelanjutan* (p. 20). [tt:http://www.zef.de/module/register/media/2390_SL-Chapter1.pdf](http://www.zef.de/module/register/media/2390_SL-Chapter1.pdf)
- Susilawati, & F, W. R. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susilo. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Wit, W. (2010). Modal Sosial Dalam Dinamika Perkembangan Sentra Industri Logam Waru Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 266–291.